

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2022 tentang Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi ini sangat penting untuk Laporan Keuangan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*.

5.2 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada Bapak Wahyu Tri Ramadhan dan Ibu Tika Robe pada sub bagian keuangan LPP TVRI NTT penulis menemukan di lapangan bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan oleh LPP TVRI NTT Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD LPP TVRI NTT menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup basis kas yaitu untuk pengukuran dan

pengakuan pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Berikut ini adalah Komponen lima entitas Laporan Keuangan yang diterapkan oleh LPP TVRI NTT berdasarkan perbandingan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan oleh LPP TVRI NTT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur unsur pendapatan dan belanja selama periode pertengahan hingga akhir tahun. Laporan realisasi anggaran juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatannya terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran terdiri dari: (1) pendapatan; (2) belanja;

- a) Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Realisasi pendapatan Negara pada 2019-2021 tidak mencerminkan estimasi dari anggaran PNBPN dan pada Laporan Keuangan tidak ada anggaran dikarenakan pada Laporan keuangan tabel anggaran karena

seharusnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor.71 tahun 2010 Laporan realisasi anggaran harus menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode pertengahan hingga akhir tahun. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) non fungsional dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terjadi pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) lainnya berupa lelang bangunan menara televisi pada satuan transmisi kalabahi pada bulan Juli 2022 selanjutnya pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan berupa potongan dari pembayaran gaji PNS terhadap penggunaan rumah dinas. Sehingga pendapatan PNBP mengalami kenaikan yang signifikan.

Tabel 5.1
Laporan Realisasi Anggaran LPP TVRI NTT dari tahun 2019-2022
(dalam rupiah)

Akun	Per 31 Desember TA 2019		Capaian	Per 31 Desember TA 2020		Capaian
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah						
Penerimaan Negara bukan Pajak	-	1.409.444.559	Tidak ada	-	3.684.129	Tidak ada
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	-	1.409.444.559	Tidak ada	-	3.684.129	Tidak ada
Belanja Negara						
Belanja Pegawai	11.664.183.000	5.949.212.981	98.71 %	11.664.183.000	11.513.946.473	98 %
Belanja Barang	7.150.246.000	7.730.712.115	92.24%	7.150.246.000	6.595.123.403	97.05%
Belanja Modal	2.542.683.000	1.524.903.475	98.23%	2.542.683.000	2.497.665.100	98.23%
TOTAL	21.357.112.000	15.204.828.571	96.49%	21.357.112.000	20.606.734.976	95.55%

Akun	Per 31 Desember TA 2021		Capaian	Per 31 Desember TA 2022		Capaian
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah						
Penerimaan Negara bukan Pajak	-	2.109.103	Tidak ada	845.500.000	69.320.995	8.00 %
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	-	2.109.103	Tidak ada	845.500.000	69.320.995	8.00 %
Belanja Negara						
Belanja Pegawai	9.139.090.000	7.708.174.685	84.34 %	8.188.347.000	7.596.291.867	92.77%
Belanja Barang	7.282.437.000	6.809.204.170	93.50%	8.789.585.000	8.422.591.447	95.82%
Belanja Modal	1.901.091.000	1.890.476.950	99.44%	3.261.104.000	3.260.169.969	99.77%
TOTAL	18.322.618.000	16.407.855.805	89.55%	20.239.036.000	19.279.053.283	95.26%

Sumber sub bagian keuangan LPP TVRI NTT

2) Neraca

Penyajian Neraca LPP TVRI NTT dengan perbandingan kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari (1) Aset Lancar; (2) Piutang jangka Panjang; (3) Aset Tetap; (4) Aset Lainnya; (5) Kewajiban Jangka Pendek; (6) Ekuitas;

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Adapun nilai aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 207.204.496.973. Yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 121.087.781, aset tetap (netto) sebesar Rp. 206.794.501.169, dan aset lainnya (netto) sebesar Rp. 288.908.023.

Adapun nilai aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 190.776.014.019. yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 121.375.355, aset tetap (netto) sebesar Rp. 190.336.208.385, dan aset lainnya (netto) sebesar Rp. 288.430.279. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 190.776.014.019.

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Adapun nilai aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 183.272.141.404. yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 214.052.224, aset tetap (netto) sebesar Rp. 182.737.067.895 dan aset lainnya (netto) sebesar Rp. 321.021.285. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp. 24.848.353 dan Rp. 183.247.293.051.

Tabel 5.2 Neraca periode 2019-2022

Nama Perkiraan	2019		2020	2021	2022
	Cat	Saldo	Saldo		
ASET					
Aset Lancar	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-		
	C.1.2	-	-		
	C.1.3	-	-		
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.4	329.427.966	329.427.966	324.927.966	330.149.676
	C.1.5	(277.864.185)	(277.864.185)	(277.414.185)	(277.440.293)
Uang muka belanja	C.1.6	51.563.381	Rp. 51.563.381	47.513.781	52.709.383
	C.1.7	69.524.000	Rp. 69.524.000	73.861.574	161.342.841
Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tidak tertagih- Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak (Netto) Persediaan					
Jumlah Aset Lancar		121.087.781	Rp. 121.087.781	121.375.355	214.052.224
Aset Tetap	C.2				
Tanah	C.2.1	131.083.336.000	131.083.336.000	131.385.585.000	131.385.585.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	103.127.139.448	103.127.139.448	104.441.457.698	108.331.839.345
	C.2.3	32.123.049.042	32.123.049.042	32.698.057.742	33.706.194.323
Gedung dan Bangunan	C.2.4	1.073.415.416	1.073.415.416	1.073.415.416	1.073.415.416
	C.2.5	27.325.000	27.325.000	27.325.000	27.325.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.6	(60.639.763.737)	(60.639.763.737)	(79.259.632.471)	(91.787.291.189)
Aset Tetap Lainnya					
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					
Jumlah Aset Tetap		206.794.501.169	206.794.501.169	190.366.208.385	182.737.067.895
Aset Lainnya	C.3				
Aset tak Berwujud	C.3.1	11.000.000	11.000.000	11.000.000	63.910.000
	C.3.2	4.209.936.408	4.209.936.408	4.209.936.408	4.209.936.408
Aset lain-lain	C.3.3	(3.932.028.385)	(3.932.028.385)	(3.932.506.129)	(3.952.825.123)
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya					
Jumlah Aset Lainnya		288.908.023	288.908.023	288.430.279	321.021.285

JUMLAH ASET		207.204.496.973	207.204.496.973	190.776.014.019	183.272.141.404
KEWAJIBAN					
Kewajiban	C.4				
Jangka Pendek	C.4.1	-	-	-	
Uang Muka	C.4.2	0	0	-	24.848.353
dari KPPN	C.4.3	0	0	-	
Utang Kepada Pihak Ketiga					
Utang Jangka Pendek Lainnya					
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0	-	24.848.353
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0	0	0
EKUITAS	C.5				
Jumlah Ekuitas	C.5.1	207.204.496.973	207.204.496.973	190.776.014.019	183.247.293.051
JUMLAH EKUITAS DANA		207.204.496.973	207.204.496.973	190.776.014.019	183.247.293.051
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		207.204.496.973	207.204.496.973	190.776.014.019	183.272.141.404

Sumber sub bagian keuangan LPP TVRI NTT

3) Laporan Operasional

Penyajian Laporan operasional LPP TVRI NTT berdasarkan kesesuaian dengan menyajikan berbagai unsur yaitu (1) pendapatan Laporan operasional; (2) Beban; (3) kegiatan non operasional; (4) pos luar biasa. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan. direalisasi, yaitu adanya aliran masuk

sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, defisit, dari operasional, defisit dari kegiatan non operasional, defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 7.360.476, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 30.068.674.142, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp. 30.061.313.666. Kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 1.715.033 dan defisit sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. 30.059.598.633.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, defisit dari kegiatan non operasional, defisit sebelum

pos luar biasa, pos luar biasa, dan defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.108.046 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 28.472.372.528 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 28.470.264.482), Kegiatan Non Operasional sebesar surplus Rp. 1.057 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 28.470.263.425).

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, defisit dari operasi, defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.320.996 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.28.044.929.780 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 28.043.608.784), surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp. 67.999.999, dan Pos Luar Biasa sebesar Rp.0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 27.975.608.785).

Tabel 5.3
Laporan Operasional periode 2019-2022

Uraian	Cat	2019	2020	2021	2022
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	2.108.046	7.360.476	2.108.046	7.360.476
Pendapatan Hibah	D.3	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		2.108.046	7.360.476	2.108.046	7.360.476
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.4	0	11.513.946.473	0	11.513.946.473
Beban Persediaan	D.5	7.708.174.685	101.951.424	7.708.174.685	101.951.424
Beban Barang dan Jasa	D.6	321.744.826	5.112.577.502	321.744.826	5.112.577.502
Beban Pemeliharaan	D.7	4.851.663.177	531.792.358	4.851.663.177	531.792.358
Beban Perjalanan Dinas	D.8	568.462.305	803.639.749	568.462.305	803.639.749
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	D.9	1.062.996.288	0	1.062.996.288	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	0	12.004.349.286	0	12.004.349.286
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	D.11	13.959.331.247	417.350.	13.959.331.247	417.350.
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		28.472.372.528	30.068.674.142	28.472.372.528	30.068.674.142
DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL		(28.470.264.482)	(30.061.313.666)	(28.470.264.482)	(30.061.313.666)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12				
Pendapatan dari kegiatan non operasional Lainnya		1.057.000	1.715.003	1.057.000	1.715.003
Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional		1.057.000	0	1.057.000	0
			7.774.283		7.774.283
			6.059.250		6.059.250
DEFISIT NON OPERASIONAL		(2.114.000)	1.715.033	(2.114.000)	1.715.033
DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			(30.059.598.633)	-	(30.059.598.633)
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.13	-	-	-	-
BIASA		-	-	(28.470.263.425)	-
DEFISIT-LO		(28.470.263.425)	(30.059.598.633)	(28.470.263.425)	(30.059.598.633)

Sumber sub bagian keuangan LPP TVRI NTT

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Kesesuaian Laporan perubahan ekuitas LPP TVRI NTT dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan ekuitas terdiri dari : (1) surplus; (2) koreksi nilai persediaan; (3) selisih revaluasi aset tetap; (4) koreksi nilai aset tetap non revaluasi; (5) transaksi antar entitas.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 184.369.164.817 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 30.059.598.633 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 9.941.351.024 dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp. 42.953.579.765 dan terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp. 22.835.332.156 sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 207.204.496.973.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.207.204.156.973, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.28.470.263.425 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.4.664.725.231 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.16.706.845.702, sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.190.776.014.019.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.190.674.659.603, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.27.975.608.785 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.20.548.242.233, sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.183.247.293.051.

Tabel 5.4
Laporan Perubahan Ekuitas periode 2019-2022

Uraian	Cat	31 Des 2019	31 Des 2020	31 Des 2021	31 Des 2022
EKUITAS AWAL	E.1	194.257.665.021	184.369.164.817	207.204.156.973	190.674.659.603
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	25.180.716.953	30.059.598.633	28.470.263.425	27.975.608.785
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENURANGI EKUITAS		-	-	-	2.888.432.000
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN		-	-	-	-
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	1.102.423.887	9.941.351.024	4.664.725.231	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	4.314.934.227	3.789.678.000	-	-
Koreksi atas Reklafikasi		4.054.630.578	3.600.000.000	-	-
Selisih Revaluasi Aset tetap	E.3.3	0	8.754.439.000	2.568.000	-
Koreksi Nilai aset tetap non revaluasi	E.3.4	842.120.238	1.193.426.024	4.660.675.231	4.658.941.037
Koreksi Lain-lain	E.35	0	6.514.000	4.050.000	4.350.700
Transaksi Antar Entitas	E.4	14.189.792.862	42.953.579.765	16.706.845.702	20.548.242.233
Kenaikan Penurunan Ekuitas	E.5	9.888.500.204	22.835.332.156	16.428.142.954	7.427.366.552
Ekuitas Akhir	E.6	184.369.164.817	207.204.496.973	90.776.014.019	183.247.293.051

Sumber sub bagian keuangan LPP TVRI NTT

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) dalam laporan keuangan LPP TVRI NTT menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk catatan atas laporan keuangan, biasanya merujuk pada catatan atas laporan keuangan yang menyertainya. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan, analisis, dan informasi rinci terkait pos-pos dalam laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap informasi yang tercantum dalam laporan keuangan.

Penjelasan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan. Penjelasan apabila terdapat penyimpangan yang signifikan.

Catatan atas laporan keuangan ini penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pemakai laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan yang tepat akan memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan

keuangan entitas pemerintah. Pastikan untuk merujuk langsung ke teks Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan panduan pelaporan keuangan yang mungkin diterbitkan oleh pihak berwenang untuk informasi yang lebih rinci dan terkini. Penting untuk mencatat peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan namun sebelum laporan diaudit atau disetujui. CALK memberikan gambaran mengenai dampak peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan dan menginformasikan pemangku kepentingan terkait risiko dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh entitas.

Entitas pemerintahan sering kali perlu membuat estimasi dalam penyusunan laporan keuangan. CALK memberikan detail terkait dengan asumsi-asumsi kritis yang digunakan dan sensitivitas dari estimasi tersebut, membantu para pemangku kepentingan dalam memahami tingkat ketidakpastian. CALK mencakup informasi tentang risiko keuangan yang dihadapi oleh entitas. Ini melibatkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta strategi manajemen risiko yang diadopsi untuk mengatasi tantangan ini.

Pos-pos tertentu dalam laporan keuangan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau klarifikasi, seperti perubahan signifikan dalam aset atau kewajiban, dijelaskan dengan rinci dalam CALK. Pentingnya keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti auditor independen, dalam menyusun CALK untuk memastikan penyajian informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5.3 Hasil Pembahasan

Implementasi Laporan Keuangan LPP TVRI NTT sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 saat ini sudah mencapai 75 % hal ini diukur dengan melihat sistem pelaporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan pos-pos dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 hanya saja terdapat beberapa kendala yaitu, laporan keuangannya belum sepenuhnya melaporkan anggaran secara terperinci seperti yang ada pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Kunci untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan entitas pemerintah di Indonesia. Standar ini mendorong konsistensi dalam pelaporan keuangan dari tahun ke tahun untuk memungkinkan perbandingan yang lebih baik. Standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas instansi pemerintah, informasi keuangan yang transparan dan dapat dipercaya menjadi fokus utama.

Standar ini mencakup entitas pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga, dan unit pelaksana teknis. Aset dan kewajiban diukur dengan menggunakan nilai sekarang (nilai kini), mengikuti prinsip akrual. Nilai sekarang mencerminkan nilai wajar dan keberlanjutan manfaat atau kewajiban. Pendapatan diakui ketika terdapat peningkatan aset atau pengurangan kewajiban yang dapat diukur secara andal. Beban diakui ketika terdapat pengurangan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur secara andal.

LPP TVRI NTT menyusun Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan

atas laporan keuangan. Informasi tersebut disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Pentingnya pengungkapan penuh dan jelas dalam laporan keuangan yang mencakup informasi yang mempengaruhi pemahaman pembaca laporan keuangan. Standar ini menekankan pentingnya implementasi dan pemeliharaan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan LPP TVRI NTT menggunakan SAIBA dan SAI termasuk sistem informasi akuntansi, untuk mendukung pelaksanaan akuntansi yang efisien dan efektif.

Laporan Realisasi Anggaran menjadi instrumen kunci dalam mengevaluasi dan menyajikan pencapaian keuangan suatu entitas pemerintahan, selaras dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mencakup beberapa komponen utama. Pertama, neraca anggaran memberikan gambaran mengenai posisi keuangan pada suatu periode tertentu, mencantumkan aset dan kewajiban secara rinci. Laporan perubahan ekuitas anggaran menggambarkan perubahan yang terjadi pada ekuitas anggaran, mencakup pendapatan, belanja, dan saldo anggaran. Selain itu, laporan arus kas anggaran memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan entitas pemerintahan. Sebagai rekomendasi, kontinuitas dalam meningkatkan transparansi, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kapasitas teknologi informasi menjadi langkah-langkah kunci untuk meningkatkan efektivitas pelaporan dan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran tidak hanya menjadi kewajiban akuntansi, tetapi juga instrumen vital dalam mendukung pertanggungjawaban dan kredibilitas pengelolaan keuangan entitas pemerintahan sesuai dengan standar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Neraca menjadi komponen kunci dalam penyajian informasi keuangan suatu entitas pemerintahan, sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Regulasi ini membentuk kerangka kerja yang memberikan pedoman yang jelas terkait penyusunan dan penyajian neraca, menekankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 memberikan kerangka kerja yang jelas, tantangan dalam menyusun neraca tetap ada. Oleh karena itu, implementasi dan pemeliharaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi serta pelibatan auditor independen dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas penyajian neraca. Dengan demikian, Neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bukan hanya menjadi tuntutan hukum, melainkan juga alat yang efektif untuk mengkomunikasikan posisi finansial dan keberlanjutan keuangan entitas pemerintahan kepada pemangku kepentingan.

Kesesuaian dengan regulasi ini memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Laporan Operasional menjadi instrumen vital dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja operasional suatu entitas pemerintahan, seiring dengan tuntutan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Regulasi ini tidak hanya menekankan pada kewajiban penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait dengan aspek operasional suatu lembaga pemerintahan. Laporan Operasional menjadi alat yang efektif untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan merencanakan tindakan perbaikan. Kesimpulan laporan menyajikan rangkuman evaluasi kinerja operasional dan memberikan dasar untuk merumuskan rencana aksi yang dapat meningkatkan kinerja ke depannya. Dengan mematuhi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan Operasional menjadi instrumen penting dalam menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh entitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menjadi landasan utama dalam mengevaluasi perubahan modal dan kepemilikan suatu entitas pemerintahan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Regulasi ini memberikan arahan yang jelas terkait penyusunan dan penyajian Laporan Perubahan Ekuitas, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Setelah menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas, entitas pemerintahan dapat merumuskan rekomendasi dan aksi perbaikan untuk meningkatkan manajemen modal dan memastikan keberlanjutan keuangan di masa

mendatang. Dengan demikian, Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bukan hanya memenuhi tuntutan regulasi, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan pada tingkat sektor publik.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah bagian penting dari penyusunan Laporan Keuangan suatu entitas pemerintahan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. CALK memberikan penjelasan dan konteks tambahan terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam laporan keuangan, meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kondisi keuangan dan kinerja entitas. CALK diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi yang mencerminkan evaluasi menyeluruh atas aspek-aspek tertentu dalam laporan keuangan. Ini memberikan arahan untuk perbaikan atau peningkatan dalam penyusunan laporan keuangan di masa mendatang. Dengan mematuhi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, CALK bukan hanya menjadi persyaratan pelaporan, melainkan juga alat yang kuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan entitas pemerintahan.